

## Analysis of the Financial Performance of the Jambi City Government Using Variance Analysis for the 2020-2022 Fiscal Year

Endang Surahyani Utami<sup>1\*</sup>, Iskandar Sam<sup>2</sup>, Salman Jumaili<sup>3</sup>

Universitas Jambi

**Corresponding Author:** Endang Surahyani Utami [endangsurahyani@icloud.com](mailto:endangsurahyani@icloud.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Government Financial Performance, Variance Analysis, Income Growth, Financial Ratio, Expenditure Harmony Ratio, Expenditure Efficiency Ratio

*Received :* 7 July

*Revised :* 15 July

*Accepted:* 23 August

©2024 Utami, Sam, Jumaili: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to evaluate the Financial Performance of the Jambi City Government through Variance Analysis for the 2020-2022 budget year. This research uses a qualitative descriptive approach by utilizing secondary data originating from the Jambi City Revenue and Expenditure Budget Realization Report for the same period. The findings show that the Financial Performance of the Jambi City Government as assessed through Income Variance Analysis is classified as Poor, Income Growth is identified as positive, the Degree of Decentralization is classified as Sufficient, the Regional Financial Dependency Ratio is classified as Very High, the Regional Financial Independence Ratio is classified as Low, the PAD Effectiveness Ratio is considered to be Fairly Effective. In terms of Performance Expenditure Variance Analysis, it is rated as Good, Operational Expenditure Analysis is rated as Fairly Good, Capital Expenditure Analysis is also rated as Fairly Good, and the Regional Expenditure Efficiency Ratio is classified as Efficient

---

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi dengan Menggunakan Analisis Varians Tahun Anggaran 2020-2022

Endang Surahyani Utami<sup>1\*</sup>, Iskandar Sam<sup>2</sup>, Salman Jumaili<sup>3</sup>

Universitas Jambi

**Corresponding Author:** Endang Surahyani Utami [endangsurahyani@icloud.com](mailto:endangsurahyani@icloud.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kinerja Keuangan Pemerintah, Analisis Varians, Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Keuangan, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Efisiensi Belanja

*Received :* 7 July

*Revised :* 15 July

*Accepted:* 23 August

©2024 Utami, Sam, Jumaili: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi melalui Analisis Varians tahun anggaran 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Jambi untuk periode yang sama. Temuan menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai melalui Analisis Varians Pendapatan tergolong Kurang Baik, Pertumbuhan Pendapatan teridentifikasi positif, Derajat Desentralisasi tergolong Cukup, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tergolong Sangat Tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong Rendah, Rasio Efektivitas PAD dinilai Cukup Efektif. Dari segi Analisis Varians Belanja Kinerja dinilai Baik, Analisis Belanja Operasional dinilai Cukup Baik, Analisis Belanja Modal juga dinilai Cukup Baik, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah tergolong Efisien

---

## PENDAHULUAN

Saat ini organisasi sektor publik berada di bawah tekanan yang besar untuk meningkatkan efisiensi mereka dengan tetap mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta dampak buruk dari operasi mereka. Panduan ini mendorong pengakuan akuntansi sebagai ilmu penting dalam tat kelola urusan publik. Awalnya, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas khusus dalam profesi yang cukup terbatas. Namun, kini berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Istilah "Sektor Publik" didefinisikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan isu-isu sosial. dari sudut pandang ekonomi, sektor publik berfungsi sebagai entitas yang menyediakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan hak-hak publik. Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu kerangka yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan mengakui secara sistematis seluruh transaksi keuangan pada entitas Pemerintah Daerah yang meliputi Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Hasil Akuntansi Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan untuk beragam khalayak, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kreditur, Donatur, dan Pemangku Kepentingan Lainnya (Yuesti dkk., 2020).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai sumber keuangan, alokasi, dan status pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Jambi, serta memberikan perbandingan jumlah realisasi dan anggaran pada saat pelaporan. Belanja dan realisasinya sesuai dengan Peraturan Darah Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Laporan Pelaksanaan Anggaran memberikan ringkasan informasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, dan laporan perbandingan pendanaan dengan anggaran tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun berdasarkan kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan OPD menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan, Catatan Permodalan dan Laporan Keuangan (Pirngadi, 2022).

Pengukuran kinerja keuangan merupakan metode resmi untuk menilai apakah suatu perusahaan efisien dan efektif dalam mencapai laba atau tingkat likuiditas yang diinginkan. Pengukuran kinerja keuangan memungkinkan evaluasi potensi pertumbuhan dan perkembangan keuangan dalam suatu perusahaan dengan sumber daya yang tersedia. Beberapa yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan sektor publik yaitu tingkat kemandirian, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat indeks kemampuan keuangan, tingkat kesesuaian pertumbuhan, tingkat ketergantungan fiskal daerah (Hery, 2018).

Analisis Varians didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang direncanakan (dianggarkan) dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Varians anggaran mengacu pada perbedaan antara angka asumsi dan angka aktual yang direalisasikan. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh berbagai faktor.

Analisis varians adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor terhadap varians secara keseluruhan (Sagara, 2021).

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

| Uraian                        | Realisasi 2020              | Realisasi 2021              | Realisasi 2022              |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pendapatan Daerah</b>      | <b>1.621.827.275.396,39</b> | <b>1.652.948.449.754,68</b> | <b>1.668.797.755.118,80</b> |
| Pendapatan Asli Daerah        | 355.674.818.034,49          | 384.730.643.791,46          | 437.025.956.388,00          |
| Pendapatan Transfer           | 1.192.943.798.615,90        | 1.206.026.802.746,00        | 1.230.873.892.188,00        |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 73.208.658.746,00           | 62.191.003.217,22           | 897.906.542,80              |
| <b>Belanja Daerah</b>         | <b>1.665.932.584.837,45</b> | <b>1.740.357.878.019,78</b> | <b>1.622.747.432.178,57</b> |
| Belanja Operasi               | 1.180.536.624.523,53        | 1.238.942.121.720,85        | 1.250.909.815.843,08        |
| Belanja Modal                 | 444.351.878.183,92          | 495.805.792.008,94          | 368.629.083.248,49          |
| Belanja Tak Terduga           | 41.044.082.130,00           | 5.609.964.289,00            | 3.208.533.087,00            |
| Penerimaan Daerah             | 211.177.186.101,02          | 249.088.085.423,59          | 215.092.419.627,49          |
| Pembiayaan Bersih             | 211.177.186.101,12          | 247.088.085.423,59          | 142.092.419.627,49          |
| <b>SiLPA</b>                  | <b>165.288.991.024,06</b>   | <b>159.678.657.158,49</b>   | <b>188.042.742.567,72</b>   |

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Pemerintah Kota Jambi mengalami kelebihan pembayaran retribusi sebesar 811,11 juta; Lebih bayar 1,43 miliar lebih untuk pelayanan PUPR dan pelayanan kesehatan; dan menimbulkan potensi kerugian akibat hancurnya bangunan dan struktur, misalnya. Rumah Pintar/Rumah Tua Pemerintah Kota Jambi (BPK, 2023). Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pendapatan PAD tahun 2022 sebesar 479,170 miliar dolar AS dan capaiannya sebesar 436,885 miliar dolar AS atau 91,18 persen. Dibandingkan dengan pencapaian pendapatan PAD tahun 2021 sebesar 384,007 miliar dolar, PAD tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,74 persen atau lebih dari 52 miliar; Target penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2022 sebesar 1,91 triliun rupiah dan keberhasilannya sebesar 1,230 triliun atau 103,29 persen. Dibandingkan perolehan pendapatan transfer tahun 2021 sebesar 1,91 triliun, Dana Perimbangan pada tahun 2022 meningkat sebesar 3,31 persen mencapai 39,414 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2022, pendapatan daerah lain yang sah belum ada targetnya. Padahal, sudah terealisasi sebesar 897 juta dengan menerima pendapatan hibah. Target belanja daerah sampai dengan perubahan APBD tahun 2022 lebih dari 1,812 triliun dengan keberhasilan 1,622 triliun atau lebih dari 89,52 triliun, dengan keberhasilan 1,622 triliun atau 89,52 persen (belum diaudit dari BPK-RI), yang terdiri dari Belanja tersebut mencapai Rp 1,250 triliun, belanja modal mencapai Rp 368,629 miliar, belanja darurat mencapai Rp 3,208 miliar, dan belanja transfer mencapai Rp 100 miliar. Dibandingkan dengan capaian anggaran belanja tahun 2021 sebesar 1740 miliar rupiah, belanja pemerintah Kota Jambi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,75 persen yaitu minus 117,5 miliar lebih (Walikota, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian pada bidang kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Dengan Menggunakan Analisis Varians Tahun Anggaran 2020-2022”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan menjelaskan potensi konflik kepentingan yang timbul antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu organisasi. Agen mempunyai lebih banyak informasi tentang bisnis dibandingkan prinsipal. Hal ini menyebabkan agen bertindak oportunistik dan memanfaatkan prinsipal. Teori keagenan membantu menjelaskan mengapa beberapa struktur tata kelola perusahaan lebih efektif dibandingkan yang lain. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan menyelesaikan potensi konflik kepentingan dalam organisasi. Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan antara kepemilikan dan pengendalian suatu organisasi. Perbedaan ini mendorong manajer untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Mereka berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan memaksimalkan keuntungan mereka, agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan publik dan kinerja perusahaan akan meningkat ketika kepemilikan atau arahan orang dalam lebih besar. Teori keagenan menjelaskan bahwa individu dan kelompok dalam organisasi bertindak sesuai dengan kepentingannya. Tujuan mereka adalah mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, dan mereka sering mengabaikan loyalitas, kebanggaan kerja, dan identifikasi terhadap tujuan organisasi. Faktor kepribadian, seperti orientasi nilai sosial, dapat mempengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Oleh karena itu, teori keagenan dapat dimodifikasi untuk memasukkan faktor-faktor kepribadian (Surifah & Rofiqoh, 2020).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bidang akuntan publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mursyidi, 2013). Akuntansi pemerintahan adalah kegiatan yang menghasilkan layanan informasi keuangan bagi entitas pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, konsolidasi dan interpretasi transaksi keuangan yang melibatkan pemerintah. Pada dasarnya konsep ini tidak jauh berbeda dengan prinsip umum akuntansi, yang membedakan secara umum adalah tujuan pencatatan dan penerima informasi, transaksi yang dicatat dalam konteks akuntansi publik mencakup seluruh kegiatan keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pemerintahan. penerima informasi tersebut. informasi umumnya masyarakat luas diwakili oleh badan legislatif pemerintah dan kreditor. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah, cabang keilmuan akuntansi secara bertahap telah mengintegrasikan akuntansi publik sebagai bagian integral dari bidangnya. Menyadari pentingnya akuntan publik sebagai

bagian dari ilmu akuntansi menambah keragaman dan kompleksitas praktik akuntansi secara umum (Sadat, 2020).

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pencatatan, evaluasi, dan identifikasi seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada satuan pemerintahan daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Tujuan utama akuntansi keuangan daerah adalah menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Laporan keuangan ini kemudian digunakan oleh beberapa pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RPPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kreditur, investor, investor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.. (Yuesti dkk., 2020).

Kinerja merupakan wujud nyata keberhasilan seseorang atau suatu organisasi dalam pemenuhan tugas dan tujuannya. Kinerja yang baik menunjukkan keberhasilan seseorang atau suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kriteria keberhasilan sangat penting dalam evaluasi kinerja, yang dapat berupa tujuan atau target tertentu. Tanpa tolak ukur yang jelas, kinerja tidak dapat diukur secara akurat. Kinerja yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan keuntungan. (Andirfa, 2018).

### **Analisis Laporan Keuangan**

Harahap mengatakan analisis laporan keuangan merupakan proses penguraian unsur-unsur yang dikandungnya menjadi satuan-satuan informasi yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan bermakna antara kuantitatif dan non-kuantitatif. Dengan demikian, kondisi keuangannya lebih diketahui. Hal ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah proses pemeriksaan berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perbedaan antara analisis laporan keuangan perusahaan dan sektor publik masih terbatas, oleh karena itu secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan aturan pengukurannya (Yuesti dkk., 2020).

Analisis varians didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang direncanakan (dianggarkan) dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Varians anggaran mengacu pada perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan angka kinerja sebenarnya. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Analisis varians adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor terhadap varians secara keseluruhan (Sagara, 2021).

#### **1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan**

Varians menunjukkan perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual, yang diukur dalam mata uang. Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara angka anggaran dengan angka sebenarnya. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Analisis varians adalah proses menentukan kontribusi masing-masing faktor terhadap total varians (Sagara, 2021).

$$\text{Analisis Varians Pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } x}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } x} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kinerja Varians Pendapatan

| Kriteria Varians Pendapatan         | Ukuran                                     |
|-------------------------------------|--|
| Baik ( <i>favourable</i> )          | Realisasi Pendapatan > Anggaran Pendapatan |
| Kurang Baik ( <i>unfavourable</i> ) | Realisasi Pendapatan < Anggaran Pendapatan |

## 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah membantu mengetahui apakah kinerja keuangan APBD pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan selama suatu tahun anggaran atau periode anggaran tertentu. Pertumbuhan pendapatan yang positif dan meningkat menunjukkan kinerja yang baik. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan yang negatif menunjukkan kinerja keuangan yang menurun. Pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan akan mengimbangi inflasi. Penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran lainnya. Seperti nilai tukar rupiah, harga minyak dll (Mahmudi, 2016).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pend. Th } x - \text{Pend. Th } (x - 1)}{\text{Pendapatan Th } (x - 1)} \times 100\%$$

## 3. Analisis Rasio Keuangan

### 1) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam pengelolaan pendapatan. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Laporan ini menunjukkan sejauh mana kontribusi DPA terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2016).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian Tingkat Desentralisasi:

Presentase PAD Terhadap TPD Tingkat Desentralisasi

0% - 10% = Sangat Kurang

10,1% - 20% = Kurang

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 20,1% - 30% | = | Cukup       |
| 30,1% - 40% | = | Sedang      |
| 40,1% - 50% | = | Baik        |
| >50%        | = | Sangat Baik |

(Kamaroellah, 2017)

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Kamaroellah, 2017).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Ketergantungan Keuangan Daerah:

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 0% - 10%    | = | Sangat Rendah |
| 10,1% - 20% | = | Rendah        |
| 20,1% - 30% | = | Sedang        |
| 30,1% - 40% | = | Cukup         |
| 40,1% - 50% | = | Tinggi        |
| >50%        | = | Sangat Tinggi |

(Kamaroellah, 2017)

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan awal daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah yang berasal dari transfer pinjaman (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan:

Presentase Kemandirian Kemampuan Keuangan

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| 0% - 25%   | = | Rendah Sekali |
| 25% - 50%  | = | Rendah        |
| 50% - 75%  | = | Sedang        |
| 75% - 100% | = | Tinggi        |

(Kamaroellah, 2017)

4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD. Rasio ini dihitung

dengan membandingkan penerimaan PAD yang sebenarnya dengan target penerimaan yang dianggarkan (Mahmudi, 2016).

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD):

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Presentase Efektivitas | = | Tingkat Efektivitas |
| >100%                  | = | Sangat Efektif      |
| 100%                   | = | Efektif             |
| 90% - 99%              | = | Cukup Efektif       |
| 75% - 89%              | = | Kurang Efektif      |
| <75%                   | = | Tidak Efektif       |

(Kamaroellah, 2017)

4. Analisis Varians Belanja

Varians menunjukkan perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual, yang diukur dalam mata uang. Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara angka anggaran dengan angka sebenarnya. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Analisis varians adalah proses menentukan kontribusi masing-masing faktor terhadap total varians (Sagara, 2021).

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$Rasio = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } x}{\text{Anggaran Belanja Tahun } x} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

| Kriteria Varians Belanja            | Ukuran                                  |
|-------------------------------------|---|
| Baik ( <i>favourable</i> )          | Realisasi Belanja < Anggaran Pendapatan |
| Kurang Baik ( <i>unfavourable</i> ) | Realisasi Belanja > Anggaran Pendapatan |

5. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasional terhadap total belanja menunjukkan proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan total anggaran daerah. Analisis ini dihitung dengan membandingkan pengeluaran operasional aktual dengan total pengeluaran daerah (Mahmudi, 2016).

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Belanja Operasi:

Presentase Kriteria Belanja Operasi

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| <40%       | = | Baik        |
| 40% - 80%  | = | Cukup Baik  |
| 80% - 100% | = | Kurang Baik |

(Sriningsih dkk., 2021)

2) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja menunjukkan proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan investasi dibandingkan dengan total anggaran daerah. Analisisnya dihitung dengan membandingkan belanja modal aktual dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016)

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

Kriteria Belanja Modal:

Presentase Kriteria Belanja Modal

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 0 - 10%   | = | Kurang Baik |
| 10% - 40% | = | Cukup Baik  |
| >40%      | = | Baik        |

(Sriningsih dkk., 2021)

Belum ada patokan yang pasti Analisis belanja modal terhadap total belanja menunjukkan proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan investasi dibandingkan dengan total anggaran daerah. Analisisnya dihitung dengan membandingkan belanja modal aktual dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016)

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Perhitungan Efisiensi Belanja

Presentase Kriteria Efisiensi

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| <100% | = | Efisien       |
| =100% | = | Cukup Efisien |
| >100% | = | Tidak Efisien |

(Mahsun, 2006)

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung khususnya melalui media. Data sekunder biasanya berupa bukti sejarah, catatan atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip (Efferin et al., 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi tahun anggaran 2020-2022 yang diperoleh dari Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi dan literatur seperti buku dan sumber perangkat keras terkait lainnya. pada masalah penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi (Efferin et al., 2008). Pendokumentasiannya dilakukan dengan menerima data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Jambi dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi. Data yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu data umum dan data khusus. Informasi umum berupa gambaran umum tentang kota Jambi seperti sejarah, simbol, visi dan misi kota Jambi. Data spesifiknya berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Kota Jambi. Alat yang digunakan untuk mengukur analisis data adalah: (1) analisis pendapatan untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kinerja keuangan; (2) Analisis pertumbuhan pendapatan untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun; (3) Laporan keuangan untuk menganalisis kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) Analisis varians belanja; (5) Analisis keselarasan belanja untuk menganalisis perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah; (6) Laporan efisiensi pengadaan untuk menganalisis efisiensi belanja daerah.

### **Analisis Data**

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan  
Varians menunjukkan perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual, yang diukur dalam mata uang. Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara angka anggaran dengan angka sebenarnya. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Analisis varians adalah proses menentukan kontribusi masing-masing faktor terhadap total varians (Sagara, 2021).
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan  
Pertumbuhan pendapatan yang positif dan meningkat menunjukkan kinerja pendapatan yang baik. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan yang negatif menunjukkan kinerja pendapatan yang menurun (Mahmudi, 2016).
3. Analisis Rasio Keuangan
  - 1) Derajat Desentralisasi  
Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam pengelolaan pendapatan. Derajat desentralisasi dihitung

dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Laporan ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. (Mahmudi, 2016).

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Kamaroellah, 2017).

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah yang berasal dari transfer pinjaman (Mahmudi, 2016).

4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD yang sebenarnya dengan target penerimaan yang dianggarkan PAD (Mahmudi, 2016).

4. Analisis Varians Belanja

Varians menunjukkan perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual, yang diukur dalam mata uang. Varians anggaran adalah selisih antara anggaran dengan angka sebenarnya. Perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya sebenarnya biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor. Analisis varians adalah proses menentukan kontribusi masing-masing faktor terhadap total varians (Sagara, 2021).

5. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Secara umum, porsi beban operasional mendominasi total belanja, antara 60 hingga 90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung mempunyai porsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah (Mahmudi, 2010).

2) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Belanja modal membawa manfaat dalam jangka menengah dan panjang dan merupakan hal yang biasa. Secara umum proporsi belanja modal terhadap belanja daerah berkisar antara 5 hingga 20% (Mahmudi, 2010). Belum ada acuan pasti berapa rasio operasional atau rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan kebutuhan investasi signifikan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan. Namun sebagai wilayah yang terletak di negara berkembang, peran

pemerintah daerah dalam menstimulasi pelaksanaan pembangunan masih relatif penting. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih tergolong rendah perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pengeluaran sebenarnya dengan anggaran pengeluaran yang telah ditentukan (Mahmudi, 2016).

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan**

Tabel 4. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 (Dalam Rupiah)

| Thn                | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              | Varians/Selisih           | (%)          | Kriteria           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| 2020               | 1.617.658.414.714,00        | 1.621.827.275.396,39        | 4.168.860.682,39          | 100,26       | Baik               |
| 2021               | 1.658.405.928.034,00        | 1.652.948.449.754,68        | (5.457.478.279,32)        | 99,67        | Kurang Baik        |
| 2022               | 1.670.844.905.471,00        | 1.668.797.755.118,80        | (2.047.150.352,20)        | 99,88        | Kurang Baik        |
| <b>Rata - Rata</b> | <b>1.648.969.749.406,33</b> | <b>1.647.857.826.756,62</b> | <b>(1.111.922.649,71)</b> | <b>99,93</b> | <b>Kurang Baik</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Varians Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Kurang Baik, dikarenakan jumlah Rata-rata Realisasi Pendapatan Kota Jambi sebesar Rp1.647.857.826.756,62 atau 99,93% dari target Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.648.969.749.406,33 dengan selisih pendapatan sebesar -Rp1.111.922.649,71. Pada Tahun 2020 Varians Pendapatan tergolong baik, dikarenakan jumlah Realisasi Pendapatan Kota Jambi sebesar Rp1.621.827.275.396,39 atau 100,26% dari target Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.617.658.414.714,00 dengan selisih pendapatan sebesar Rp4.168.860.682,39. Pada tahun 2021 Varians Pendapatan dikatakan kurang baik, dikarenakan jumlah Realisasi Pendapatan Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.652.948.449.754,68 atau 99,67% dari target Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.658.405.928.034,00 dengan selisih pendapatan sebesar -Rp5.457.478.279,32. Pada tahun 2022 dikatakan kurang baik, dikarenakan jumlah Realisasi Pendapatan Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.668.797.755.118,80 atau 99,88% dari target Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.670.844.905.471,00 dengan selisih pendapatan sebesar -Rp2.047.150.352,20.

### Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022

| Tahun            | Realisasi                   | Pertumbuhan Pendapatan (%) | Kriteria       |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 2019             | 1.341.229.643.171,94        | -                          | -              |
| 2020             | 1.621.827.275.396,39        | 20,92                      | Positif        |
| 2021             | 1.652.948.449.754,68        | 1,92                       | Positif        |
| 2022             | 1.668.797.755.118,80        | 0,96                       | Positif        |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>1.571.200.780.860,45</b> | <b>7,93</b>                | <b>Positif</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 mengalami pertumbuhan secara Positif yaitu sebesar Rp1.571.200.780.860,45 atau 7,93%. Pada tahun 2020 jumlah Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.621.827.275.396,39 mengalami pertumbuhan sebesar 20,92% dari Realisasi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.341.229.643.171,94. Pada tahun 2021 jumlah Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.652.948.449.754,68 mengalami pertumbuhan sebesar 1,92% dari Realisasi Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.621.827.275.396,39. Pada tahun 2022 jumlah Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.668.797.755.118,80 mengalami pertumbuhan sebesar 0,96% dari Realisasi Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.652.948.449.754,68.

### Analisis Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi

Tabel 6. Analisis Derajat Desentralisasi Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022

| Thn                     | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan Daerah     | Rasio (%)    | Kinerja      |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2020                    | 355.674.818.034,49          | 1.621.827.275.396,39        | 21,93        | Cukup        |
| 2021                    | 384.730.643.791,46          | 1.652.948.449.754,68        | 23,27        | Cukup        |
| 2022                    | 437.025.956.388,00          | 1.668.797.755.118,80        | 26,19        | Cukup        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>392.477.139.404,65</b>   | <b>1.647.857.826.756,62</b> | <b>23,82</b> | <b>Cukup</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Derajat Desentralisasi Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Cukup, dikarenakan presentase Derajat Desentralisasi memiliki rata-rata sebesar 23,82%. Pada Tahun 2020 Derajat Desentralisasi tergolong Cukup karena memiliki perbandingan PAD dan TPD sebesar 21,93%. Pada tahun 2021 Derajat Desentralisasi mengalami kenaikan PAD dan TPD dari tahun 2020 sebesar 1,34% menjadi

sebesar 23,27% dan masih tergolong Cukup. Pada tahun 2022 Derajat Desentralisasi mengalami kenaikan PAD dan TPD dari tahun 2021 sebesar 2,91% menjadi sebesar 26,19% dan tetap tergolong Cukup.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 7. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                     | Pendapatan Transfer (Rp)    | Total Pendapatan Daerah     | Rasio (%)    | Kriteria             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 2020                    | 1.192.943.798.615,90        | 1.621.827.275.396,39        | 73,55        | Sangat Tinggi        |
| 2021                    | 1.206.026.802.746,00        | 1.652.948.449.754,68        | 72,96        | Sangat Tinggi        |
| 2022                    | 1.230.873.892.188,00        | 1.668.797.755.118,80        | 73,76        | Sangat Tinggi        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>1.209.948.164.516,63</b> | <b>1.647.857.826.756,62</b> | <b>73,42</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Sangat Tinggi, dikarenakan presentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki rata-rata 73,42%. Pada tahun 2020 Rasio Ketergantungan Keuangan tergolong Sangat Tinggi karena memiliki rasio sebesar 73,55%. Pada tahun 2021 Rasio Ketergantungan mengalami penurunan presentase dari tahun 2020 sebesar 0,59% menjadi 72,96% dan masih tergolong Sangat Tinggi. Pada tahun 2022 Rasio Ketergantungan Keuangan mengalami kenaikan presentase dari tahun 2021 sebesar 0,80% menjadi 73,76% dan tetap tergolong Sangat Tinggi.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 8. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                     | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Transfer (Rp)    | Rasio (%)    | Kriteria      |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 2020                    | 355.674.818.034,49           | 1.192.943.798.615,90        | 29,81        | Rendah        |
| 2021                    | 384.730.643.791,46           | 1.206.026.802.746,00        | 23,27        | Rendah        |
| 2022                    | 437.025.956.388,00           | 1.230.873.892.188,00        | 26,19        | Rendah        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>392.477.139.404,65</b>    | <b>1.209.948.164.516,63</b> | <b>32,44</b> | <b>Rendah</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa laporan kemandirian keuangan daerah Kota Jambi tahun anggaran 2020-2022 tergolong rendah, karena persentase laporan kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata sebesar 32,44%. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah

karena memiliki rasio sebesar 29,81%. Pada tahun 2021, tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan persentase dari 6,54% menjadi 23,27% pada tahun 2020 dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan persentase dibandingkan tahun 2021 dari 2,92% menjadi 26,19% dan masih rendah.

**Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Tabel 9. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                     | Anggaran PAD (Rp)         | Realisasi PAD (Rp)        | Rasio (%)    | Tingkat Efektif      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 2020                    | 369.594.193.000,00        | 355.674.818.034,49        | 96,23        | Cukup Efektif        |
| 2021                    | 454.001.834.233,00        | 384.730.643.791,46        | 84,74        | Kurang Efektif       |
| 2022                    | 479.170.812.838,00        | 437.025.956.388,00        | 91,20        | Cukup Efektif        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>434.255.613.357,00</b> | <b>392.477.139.404,65</b> | <b>90,38</b> | <b>Cukup Efektif</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2020-2022 tergolong cukup efisien karena persentase rasio efisiensi PAD mempunyai rata-rata sebesar 90,38%. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif karena memiliki rasio efektivitas PAD sebesar 96,23%. Pada tahun 2021, rasio efektivitas PAD mengalami penurunan persentase dibandingkan tahun 2020 dari 11,49% menjadi 84,74% dan tergolong kurang efektif. Pada tahun 2022, rasio efisiensi PAD mengalami peningkatan persentase dibandingkan tahun 2021 dari 6,46% menjadi 91,20% dan tergolong cukup efisien.

**Analisis Varians Belanja**

Tabel 10. Analisis Varians Belanja Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              | Varians/Selisih             | (%)          | Kriteria    |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 2020               | 1.826.930.849.781,00        | 1.665.932.584.837,45        | (160.998.264.943,55)        | 91,19        | Baik        |
| 2021               | 1.961.694.919.058,00        | 1.740.357.878.019,78        | (221.337.041.038,22)        | 88,72        | Baik        |
| 2022               | 1.812.832.658.629,00        | 1.622.747.432.178,57        | (190.085.226.450,43)        | 89,51        | Baik        |
| <b>Rata – Rata</b> | <b>1.867.152.809.156,00</b> | <b>1.676.345.965.011,93</b> | <b>(190.806.844.144,07)</b> | <b>89,78</b> | <b>Baik</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Varians Belanja Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Baik, dikarenakan jumlah Rata-Rata Realisasi Belanja Rp1.676.345.965.011,93 atau 89,78% dari jumlah Rata-Rata

Anggaran Belanja Rp1.867.152.809.156,00 dengan Selisih Belanja - Rp190.806.844.144,07.

### Analisis Keserasian Belanja

### Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 11. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                     | Realisasi Belanja Operasi (Rp) | Total Belanja Daerah (Rp)   | Rasio (%)    | Kinerja           |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 2020                    | 1.180.536.624.523,53           | 1.665.932.584.837,45        | 70,86        | Cukup Baik        |
| 2021                    | 1.238.942.121.720,85           | 1.740.357.878.019,78        | 71,19        | Cukup Baik        |
| 2022                    | 1.250.909.815.843,08           | 1.622.747.432.178,57        | 77,09        | Cukup Baik        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>1.223.462.854.029,15</b>    | <b>1.676.345.965.011,93</b> | <b>72,98</b> | <b>Cukup Baik</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Cukup Baik dikarenakan presentase Analisis Belanja Operasi Kota Jambi memiliki rata-rata 72,98%. Pada tahun 2020 Varians Belanja tergolong Baik karena jumlah Realisasi Belanja Kota Jambi sebesar Rp1.665.932.584.837,45 atau 91,19% dari target Anggaran Belanja Rp1.826.930.849.781,00 dengan Selisih Belanja Kota Jambi -Rp160.998.264.943,55. Pada tahun 2021 Varians Belanja Kota Jambi dikatakan Baik, dikarenakan jumlah Realisasi Belanja Kota Jambi sebesar Rp1.740.357.878.019,78 atau 88,72% dari target Anggaran Belanja Kota Jambi sebesar Rp1.961.694.919.058,00 dengan Selisih Belanja Kota Jambi -Rp221.337.041.038,22. Pada tahun 2022 Varians Belanja Kota Jambi tergolong Baik karena jumlah Realisasi Belanja Kota Jambi sebesar Rp1.622.747.432.178,57 atau 89,78% dari target Anggaran Belanja Kota Jambi sebesar Rp1.812.832.658.629,00 dengan Selisih Belanja Kota Jambi -Rp190.085.226.450,43.

### Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tabel 12. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Jambi tahun 2020-2022

| Thn                     | Realisasi Belanja Modal (Rp) | Total Belanja Daerah (Rp)   | Rasio (%)    | Kinerja           |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 2020                    | 444.351.878.183,92           | 1.665.932.584.837,45        | 26,67        | Cukup Baik        |
| 2021                    | 495.805.792.008,94           | 1.740.357.878.019,78        | 28,49        | Cukup Baik        |
| 2022                    | 368.629.083.248,49           | 1.622.747.432.178,57        | 22,72        | Cukup Baik        |
| <b>Rata<sup>2</sup></b> | <b>436.262.251.147,12</b>    | <b>1.676.345.965.011,93</b> | <b>26,02</b> | <b>Cukup Baik</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Cukup Baik dikarenakan rata-rata memiliki presentase sebesar 26,02%. Pada Tahun 2020 Analisis Belanja Operasi Kota Jambi tergolong Cukup Baik karena memiliki presentase sebesar 70,86%. Pada tahun 2021 Analisis Belanja Operasi Kota Jambi mengalami kenaikan presentase dari tahun 2020 sebesar 0,33% menjadi 71,19% dan masih tergolong Cukup Baik. Pada tahun 2022 Analisis Belanja Operasi Kota Jambi mengalami kenaikan presentase dari tahun 2021 sebesar 5,9% menjadi 77,09% dan tetap tergolong Cukup Baik.

### Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 13. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022

| Thn              | Anggaran Belanja (Rp)       | Realisasi Belanja (Rp)      | Rasio (%)    | Kinerja        |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 2020             | 1.826.930.849.781,00        | 1.665.932.584.837,45        | 91,19        | Efisien        |
| 2021             | 1.961.694.919.058,00        | 1.740.357.878.019,78        | 88,72        | Efisien        |
| 2022             | 1.812.832.658.629,00        | 1.622.747.432.178,57        | 89,51        | Efisien        |
| <b>Rata-Rata</b> | <b>1.867.152.809.156,00</b> | <b>1.676.345.965.011,93</b> | <b>89,78</b> | <b>Efisien</b> |

(Sumber: Data Diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020-2022 tergolong Efisien, dikarenakan rata-rata Jumlah Realisasi sebesar Rp1.676.345.965.011,93 atau sebesar 89,78 dari Anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.867.152.809.156,00. Pada tahun 2020 Rasio Efisiensi Belanja Kota Jambi tergolong Efisien, dikarenakan memiliki

Realisasi sebesar Rp1.665.932.584.837,45 atau sebesar 91,19% dari Anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.826.930.849.781,00. Pada tahun 2021 Rasio Belanja Daerah Kota Jambi mengalami penurunan presentase dari tahun 2020 sebesar 2,47% menjadi 88,72% dengan kenaikan jumlah Realisasi Belanjasebesar Rp74.425.293.182,33 menjadi Rp1.740.357.878.019,78 dan masih tergolong Efisien. Pada tahun 2022 Rasio Belanja Daerah Kota Jambi mengalami kenaikan presentase dari tahun 2021 sebesar 0,79% menjadi 89,51% dengan penurunan jumlah Realisasi Belanja sebesar Rp117.610.445.841,21 menjadi Rp1.622.747.432.178,57 dan tetap tergolong Efisien.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Varians Pendapatan**

Pada Tahun 2020, Pendapatan Pemerintah Kota Jambi dikategorikan Baik, dikarenakan dapat memenuhi target Pendapatan yang telah dianggarkan, namun masih terdapat beberapa pendapatan yang tidak dapat melebihi target pendapatan, hal ini dikarenakan terdapat Kebijakan terbaru perihal Penanganan *Covid-19* yang menyebabkan pendapatan di bagian Pajak terutama pada pajak hiburan dan restoran menurun dan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, Pendapatan Transfer pada tahun 2020 melebihi target anggaran dikarenakan kenaikan Dana Transfer Daerah sebagai bagian dari penanganan *Covid-19*. Pada tahun 2021, Pendapatan Pemerintah Kota Jambi diaktegorikan Kurang Baik, dikarenakan tidak dapat memenuhi target Pendapatan yang telah dianggarkan, hal ini dikarenakan Pendapatan pajak yang menurun akibat dari Pandemi *Covid-19* dan ditutupnya objek wisata dan berkurangnya antusiasme masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata dan berkurangnya promosi melalui media elektronik maupun iklan. Pada tahun 2022, Pendapatan Pemerintah Kota Jambi dikategorikan Kurang Baik, dikarenakan adanya penertiban bangunan reklame yang tidak berizin dan tidak dipungutnya pajak atas reklame dan berkurangnya jumlah *Billboard* yang berkaitan dengan Peraturan Menteri No.20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Pendapatan Transfer yang berkurang dikarenakan terjadi pengurangan Alokasi Dana Insentif Daerah untuk percepatan ekonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan Teori Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan bernilai positif dan cenderung meningkat, sebaliknya jika pertumbuhan pendapatan bernilai negatif maka mengindikasikan adanya penurunan kinerja pendapatan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Mahmudi (2016) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan buruk karena pemerintah daerah tidak mampu memenuhi anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Suatu pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja pendapatan yang baik apabila mampu meningkatkan pendapatan di atas jumlah pendapatan yang dianggarkan.

### **Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

Pada tahun 2020, Pertumbuhan Pendapatan Kota Jambi dikategorikan Positif, dikarenakan peningkatan Penerimaan dari pajak daerah yang meliputi pajak jasa umum, pajak jasa dunia usaha dan sebagian biaya perizinan. Pada tahun 2021 Pertumbuhan pendapatan Kota Jambi menurun dikarenakan terdapat beberapa pendapatan yang mengalami penurunan, yaitu penerimaan

pajak hiburan dan reklame akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ditutupnya beberapa fasilitas pajak hiburan dan berkurangnya antusiasme dari masyarakat untuk berkunjung ke tempat objek pajak hiburan, dan berkurangnya promosi-promosi melalui media elektronik atau iklan. Realisasi Lain-Lain PAD. Dana perimbangan, termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, mengalami penurunan. Meskipun presentase pertumbuhan menurun dari tahun 2020 tetapi PAD pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang didorong oleh Pajak Daerah yang naik, Pajak atas jasa pemakaman dan pemakaman serta pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022, Pertumbuhan pendapatan menurun dikarenakan terdapat beberapa pendapatan yang mengalami penurunan, yaitu Retribusi Daerah yang mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya pengurangan alokasi DID tahun 2022 untuk Kota Jambi yang dipergunakan untuk Percepatan pemulihan ekonomi di daerah. PAD wajib lainnya mengalami penurunan akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang mengatur tentang dana bantuan untuk Daerah. operasional sekolah (BOS) dari APBN tahun 2022 dialokasikan pada pendapatan nonfisik DAK. Meskipun presentase pertumbuhan pendapatan di tahun 2022 menurun tetapi jumlah Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan karena didorong oleh Pendapatan Pajak Daerah yang naik dan Pendapatan HPKD naik.

### **Analisis Rasio Keuangan**

#### **Derajat Desentralisasi**

Pada tahun 2020, derajat desentralisasi di Kota Jambi tergolong cukup. Hal ini didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah yang mencakup pajak daerah yang terdiri dari kenaikan biaya vakum WC/WC dan biaya izin mendirikan bangunan. Pada tahun 2021, derajat desentralisasi Kota Jambi mengalami peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan tahun 2020 yang tergolong cukup baik. Hal ini didukung oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah yaitu kenaikan Pajak Daerah yaitu BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Pelayanan Pemakaman, Pengabuan Mayat, dan Pelayanan Kesehatan. Pada tahun 2022, Derajat Desentralisasi Kota Jambi mengalami kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan tahun 2021 tergolong Cukup. Hal ini didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah yaitu peningkatan pajak daerah yang terdiri atas pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, BPHTB; Pajak pemanfaatan barang milik daerah dan pajak tempat hiburan dan olah raga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari dan Astuti (2023) bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sleman dinilai memadai karena turun dalam skala persentase dari 28,71% menjadi 35,29%.

#### **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jambi dikategorikan Sangat Tinggi, dikarenakan Pendapatan Transfer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi dan menunjukkan bahwa dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Jambi masih bergantung pada Pendapatan Transfer dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer tahun lalu, Pendapatan Transfer mengalami penurunan yang meliputi penurunan Dana Alokasi Umum dan DBH Sumber Daya Alam, Transfer Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2021, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jambi dikategorikan Sangat Tinggi, dikarenakan kenaikan Pendapatan Transfer yang terdiri dari Penurunan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, kenaikan Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya penambahan alokasi DID tahun 2021 dalam kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, kenaikan Dana Bagi Hasil. Pada tahun 2022, Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Jambi dikategorikan Sangat Tinggi, dikarenakan kenaikan Pendapatan Transfer yang terdiri dari kenaikan Dana Perimbangan, kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang meliputi Kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titania & Suhartini (2022) bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kota Depok sangat tinggi dengan presentase di atas 50%. Diperjelas oleh teori dari Mahmudi (2016) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi tergolong rendah, hal ini disebabkan karena adanya selisih pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer yang besar yaitu sebesar Rp 837.268.980.581,41. Pada tahun 2021, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi mengalami peningkatan pendapatan asli daerah dan transfer, namun masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi mengalami peningkatan pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan, namun masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pendapatan pemerintah pusat dan provinsi jauh lebih dominan terhadap pendapatan daerah kota Jambi dibandingkan dengan independensi pemerintah daerah kota Jambi yang tidak sepenuhnya menerapkan otonomi keuangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Forna dkk (2021) bahwa kemandirian keuangan daerah kota Jambi pada tahun 2010-2019 tergolong rendah untuk dijadikan pertimbangan dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memegang peranan paling penting dalam urusan keuangan dengan mendukung sistem pemerintahan kota Jambi. Jambi khususnya dalam pembayaran gaji. karyawan, barang. biaya dan biaya modular.

#### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2020, rasio efisiensi pendapatan awal daerah Kota Jambi tergolong cukup efisien, hal ini didukung dengan besarnya realisasi pendapatan awal daerah yang mampu memenuhi anggaran PAD yang telah ditetapkan. Analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase efisiensi PDSH dibandingkan tahun 2020 yang tergolong kurang efisien. Memang besaran pendapatan awal daerah yang direalisasikan bisa saja tidak memenuhi anggaran PAD yang telah ditetapkan. Analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan persentase efisiensi PAD dibandingkan tahun 2021. Hal ini didukung oleh besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang tidak dapat

memenuhi anggaran PAD yang telah ditetapkan. Analisis laporan awal efisiensi pendapatan daerah pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase efisiensi DPSH dibandingkan tahun 2020 yang tergolong kurang efisien. Memang besaran pendapatan awal daerah yang direalisasikan bisa saja sesuai dengan anggaran PAD yang telah ditetapkan. Analisis rasio efisiensi pendapatan awal daerah pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan persentase efisiensi PAD dari tahun 2021.

#### **Analisis Varians Belanja**

Pada tahun 2020, Analisis Varians Belanja Kota Jambi dikategorikan Baik, dikarenakan Jumlah Realisasi Anggaran tidak melebihi Target Anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, terdapat Anggaran Belanja yang melebihi target anggaran, hal ini terjadi pada Belanja Tak terduga yang disebabkan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Pada tahun 2021, analisis kesenjangan pengeluaran Kota Jambi dinilai baik karena besaran anggaran saat ini tidak melebihi tujuan anggaran. Pada tahun 2022, analisis belanja daerah Kota Jambi dinilai baik karena realisasi total anggaran belanja tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fajriansyah dkk. (2019) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bitung tahun 2016-2017 tergolong baik karena pemerintah kota Bitung menggunakan kurang dari 100% dari total anggaran belanja yang ditetapkan.

#### **Analisis Keserasian Belanja**

##### **Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja**

Pada tahun 2020, Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kota Jambi dikategorikan Cukup Baik. Hal ini didukung oleh penurunan Belanja Pegawai dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah PNS yang memasuki masa purnabakti untuk menindaklanjuti hal tersebut maka mulai dilakukan pemberhentian pemotongan TAPERUM dari bulan September 2020 sampai dengan akhir tahun 2020, meningkatnya realisasi beban barang dan jasa, termasuk beban jasa konsultasi dan beban barang yang akan diterbitkan. Pada tahun 2021, analisis beban operasional terhadap total belanja kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan beban usaha pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang terdiri dari peningkatan beban pegawai karena pembayaran utang Askes (BPJS 4%), penurunan beban barang dan jasa, peningkatan . dalam biaya. pada subsidi. Akibat penganggaran belanja properti oleh pemerintah pusat, peningkatan belanja bantuan sosial disebabkan adanya permintaan tambahan alokasi perbaikan RTLH dan bantuan beasiswa (kartu pintar Jambi). Pada tahun 2021, analisis beban operasional terhadap total belanja kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya pengeluaran pegawai karena pembayaran utang Askes (BPJS 4%), peningkatan pengeluaran barang dan jasa karena relaksasi kebijakan mobilitas di masa pandemi Covid-19, peningkatan subsidi wajib. Belanja Karena adanya penganggaran belanja subsidi dari Dana BOS untuk SD dan SMP swasta di Kota Jambi, maka pengurangan belanja bansos tersebut berasal dari permintaan tambahan tunjangan RTLH dan bantuan beasiswa (Jambi). kartu pintar). Pada tahun 2022, analisis beban operasional terhadap total belanja kota Jambi

tergolong cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah lebih dominan didistribusikan pada belanja operasional daerah Kota Jambi dibandingkan belanja modal.

### **Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

Pada tahun 2020, Analisis belanja fesyen terhadap total belanja di Kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan belanja modal dibandingkan tahun lalu yang meliputi penurunan belanja modal atas tanah untuk pembelian tanah kantor pemerintahan di Kota Jambi, rumah dinas ketua DPRD dan ruang terbuka publik. peningkatan investasi pada peralatan dan mesin. Belanja, khususnya belanja peralatan medis dan kesehatan, pengurangan belanja modal untuk bangunan dan bangunan, pengurangan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, peningkatan belanja modal untuk aset tetap lainnya, khususnya belanja modal untuk pembelian barang dan perpustakaan, penurunan belanja modal. untuk aset lainnya, peningkatan biaya tak terduga akibat refocusing dan redistribusi anggaran penanganan pandemi Covid-19 (bidang kesehatan, sektor sosial dan pengelolaan dampak ekonomi). Pada tahun 2021, analisis belanja modal terhadap total belanja kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi peningkatan belanja modal untuk tanah, penurunan belanja modal untuk peralatan dan mesin, khususnya belanja modal untuk peralatan medis dan kesehatan, peningkatan belanja modal untuk bangunan dan bangunan, peningkatan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, penurunan belanja modal untuk aset tetap lainnya, penurunan belanja modal untuk aset tetap lainnya karena pada tahun 2021 beban modal untuk aset lain-lain, yang merupakan aset tidak berwujud, diasumsikan beban modal untuk aset tetap lainnya, dengan penurunan biaya tak terduga. Pada tahun 2022, analisis belanja modal terhadap total belanja kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi penurunan belanja modal untuk tanah, penurunan belanja modal untuk peralatan dan mesin, khususnya penanaman modal untuk peralatan medis dan kesehatan, penurunan belanja modal. untuk bangunan gedung dan bangunan, pengurangan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, pengurangan belanja modal pada aset tetap lainnya terutama belanja modal bahan cetakan perpustakaan, pengurangan biaya kontinjensi. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal tidak melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Mahmudi (2016) bahwa pengeluaran investasi saat ini tidak rutin, pengeluaran investasi tersebut mempengaruhi anggaran pemerintah daerah, termasuk pertumbuhan aset daerah. Pemerintah daerah berpendapatan rendah umumnya mempunyai proporsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berpendapatan rendah berorientasi untuk aktif mengeluarkan modal sebagai bagian dari penanaman modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah berpendapatan tinggi umumnya mempunyai modal yang cukup.

### **Rasio Efisiensi Belanja**

Pada tahun 2020, laporan efisiensi belanja Kota Jambi tergolong efisien karena mencapai belanja sebesar Rp1.665.932.584.837,45 yaitu 91,19 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.826.930.840. Hal ini terlihat dari peningkatan beban operasional, peningkatan beban modal, dan peningkatan biaya tak terduga. Pada tahun 2021, analisis rasio efisiensi pembelian mengalami penurunan persentase dibandingkan tahun 2020 dari 2,47% menjadi 88,72% dengan peningkatan jumlah pembelian yang dilakukan dari Rp74.425.293.182,33 menjadi Rp1.740.357.878.019 sebagai efektif dan dinilai Rp. Hal ini jelas berarti berkurangnya biaya operasional, peningkatan biaya modal, dan pengurangan biaya darurat. Pada tahun 2022, analisis rasio efisiensi pembelian mengalami peningkatan persentase dibandingkan tahun 2021 dari 0,79% menjadi 89,51% dengan penurunan jumlah pembelian yang dilakukan dari Rp117.610.445.842,21 menjadi 1.622.747.432,17. dinilai efektif dan dinilai Rp. Hal ini terlihat dari kenaikan beban operasional, penurunan beban modal, dan penurunan beban tak terduga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fornia dkk. (2021) bahwa efisiensi belanja pemerintah kota Jambi pada tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan tergolong efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Jambi dapat menghemat pengeluarannya dan tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Hasil analisis tersebut didukung oleh teori Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dianggap telah melaksanakan efisiensi anggaran jika tingkat efisiensinya kurang dari 100%, begitu pula sebaliknya jika lebih besar dari 100. % maka diketahui telah meloloskan anggaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis variasi pendapatan, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata capaian sebesar Rp1.647.857.826.756,62 atau 99,93% tergolong miskin karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila mampu menerima pendapatan di atas jumlah yang diperkirakan. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan Kota Jambi, secara keseluruhan persentasenya mengalami peningkatan dan tergolong positif.

Berdasarkan analisis derajat desentralisasi, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata persentase sebesar 23,82%. Kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dinilai cukup.

Berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata persentase sebesar 73,42%. Ketergantungan pendapatan asli daerah pada pemerintah pusat dan provinsi tergolong sangat tinggi dan pendapatan asli daerah kota Jambi masih rendah.

Berdasarkan analisis laporan kemandirian keuangan daerah, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata persentase sebesar 32,44%. Pendapatan transfer yang masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa kemandirian tergolong rendah.

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi pendapatan asli daerah, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 90,38%. Penerimaan PAD belum mampu mencapai anggaran yang ditetapkan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya terbukti sangat efektif.

Berdasarkan analisis kesenjangan pengeluaran, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.676.345.965.011,93 atau 89,78%. Kinerja keuangan menunjukkan hasil yang baik karena rata-rata biaya yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah anggaran pengeluaran.

Berdasarkan analisis biaya operasional terhadap total pengeluaran seluruh kota Jambi rata-rata sebesar 72,98%. Beban operasional cenderung meningkat setiap tahunnya dan dinilai cukup baik.

Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja kota Jambi secara keseluruhan rata-rata sebesar 26,02%. Belanja modal yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya menunjukkan hasil yang cukup baik.

Berdasarkan analisis laporan efisiensi belanja daerah, Kota Jambi secara keseluruhan memiliki rata-rata keberhasilan sebesar Rp1.676.345.965.011,93 atau 89,78%. Pemerintah dianggap efisien dalam mendistribusikan belanja daerah atau tidak terjadi kerugian anggaran karena nilai efisiensi belanja kurang dari 100%.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Pada penelitian selanjutnya, kami berharap dapat mengembangkan penelitian terkait kinerja keuangan daerah. Menggunakan variabel-variabel yang tidak disebutkan dalam penelitian ini, yaitu rasio efisiensi pendapatan, rasio efisiensi fiskal, tingkat iuran BUMD dan pertumbuhan pengeluaran.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan dibantu, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah berkontribusi terhadap terbitnya karya ilmiah ini atas dukungan dan bantuannya. Peneliti berharap artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca yang memerlukannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 1-19.
- Andirfa, M. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam Maryana (Ed.), *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (hlm. 9)*. Unimal Press.
- Aurin, R., & Sam, I. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4).
- BPK. (2023). *Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi Meraih Opini WTP*.
- BPS, J. (2023). *Badan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2021-2022*.

- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72–88.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi : Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Edisi 1, hlm. 308–316). Graha Ilmu.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4465–4474.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124.
- Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13301>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (C. M. Firdausy, Ed.; hlm. 59). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Dalam *Analisis Laporan Keuangan*. PT.Grasindo.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Lase, L. P. D., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 254–260.

- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1-9.
- Localise Sdgs Indonesia. (2018, Agustus). Profil Daerah. *Localise Sdgs Indonesia*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Dua). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (hlm. 89-232). UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Dalam Mardiasmo (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi satu, hlm. 181-182). ANDI (Anggota IKAPI).
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Cetakan 2, hlm. 1-2). Refika Aditama.
- Muthaher, O. (2019). Government Accounting Standard, Human Capacity, Internal Control System and Financial Supervision As a Quality Analysis of Government Financial Statement. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), 186-200. <https://doi.org/10.34152/fe.14.1.186-200>
- Ngangi, A. I., Murni, S., & Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMB : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4), 4103-4112.
- Nurmalasari, O., & Astuti, T. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Pada Tahun 2020-2022. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 6(3), 302-309.
- Pirngadi, A. (2022). *Laporan Keuangan BPKPD Provinsi Jambi T.A 2022*.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2), 1-12. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Rustan, R., Muttiarni, M., & Wahyuni, I. (2019). Analisis Varians Biaya Operasional Dalam Mengukur Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i1.2529>

- Sadat, A. (2020). *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Dalam *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)* (hlm. 9–10). Bumi Aksara.
- Sadeli, L. M. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi (Edisi Satu)*. Bumi Aksara.
- Sagara, Y. (2021). Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam R. Adelina (Ed.), *Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi Satu, hlm. 86–92)*. PT. RAja Grafindo Persada.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020. *Bisma : Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.
- Sihaloho, G. R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016-2020. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, 3(1), 86–99.
- Sriningsih, S., Ismawati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Surifah, & Rofiqoh, I. (2020). Corporate Governance - Badan Usaha Milik Negara. Dalam *Corporate Governance - Badan Usaha Milik Negara (Edisi 2, hlm. 44–46)*. Graha Aksara Makassar.
- Susilowati, L. (2016). *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang (B. N. Asiyah, Ed.; Edisi 1, hlm. 35)*. Kalimedia.
- Tanjung, A. H. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual (Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010)* (hlm. 12). Alfabeta.
- Titania, G., & Suhartini, T. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2017-2020. *Prosiding SNAM PNJ*.
- T.Noor, J. (2022, Agustus 28). *Sejarah Kota Jambi*.
- Walikota, J. (2022). *Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2022*.
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Dalam N. W. Rustiarini (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik (hlm. 1–88)*. CV. Noah Aletheia.